

UMK, PDRB, dan PMDN terhadap Penyerapan Tenaga Kerja di Provinsi Banten

Rachmania Noor Hidayah^{1*}, Kiky Asmara²

^{1,2}Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur, Indonesia

Email: 22011010008@student.upnjatim.ac.id^{1*}

Abstrak

Penyerapan tenaga kerja merupakan indikator penting dalam mengukur efektivitas pembangunan ekonomi regional. Penelitian ini mengkaji pengaruh upah minimum, PDRB, dan PMDN terhadap penyerapan tenaga kerja di Provinsi Banten periode 2017–2024, menggunakan regresi data panel pada empat kabupaten/kota: Kabupaten Tangerang, Kabupaten Serang, Kota Tangerang, dan Kota Cilegon. Uji Chow dan uji Hausman mengarahkan pada penggunaan Fixed Effect Model (FEM). Hasil estimasi menunjukkan secara simultan, ketiga variabel berpengaruh signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja, namun secara parsial hanya PDRB yang signifikan, sedangkan UMK dan PMDN tidak berpengaruh signifikan. Temuan ini mengindikasikan bahwa pertumbuhan ekonomi regional menjadi faktor dominan penyerapan tenaga kerja, sementara struktur industri padat modal di Banten mereduksi sensitivitas penyerapan tenaga kerja terhadap perubahan upah dan investasi domestik. Kontribusi penelitian ini adalah menyediakan bukti empiris determinan penyerapan tenaga kerja pada wilayah berstruktur industri padat modal, konteks yang masih terbatas dikaji dibandingkan wilayah padat karya. Implikasinya, kebijakan penyerapan tenaga kerja di Banten perlu diarahkan pada penguatan pertumbuhan ekonomi regional dan diversifikasi sektor padat karya, tidak hanya mengandalkan instrumen upah minimum dan investasi domestik.

Keyword: UMK, PDRB, PMDN, Penyerapan tenaga kerja

PENDAHULUAN

Penyerapan tenaga kerja mencerminkan seberapa besar kemampuan ekonomi suatu wilayah dalam menempatkan angkatan kerja ke dalam proses produksi. Indikator ini menjadi ukuran penting bagi keberhasilan pembangunan ekonomi daerah, karena tingginya penyerapan tenaga kerja tidak hanya berdampak pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga berkontribusi langsung terhadap penurunan angka kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat secara umum (Tarman et al., 2022).

Provinsi Banten merupakan salah satu kawasan industri terbesar di Indonesia. Pada tahun 2024, Banten mencatat sebanyak 3.397 perusahaan industri pengolahan skala

menengah dan besar. Meskipun demikian, jumlah penyerapan tenaga kerja di provinsi ini hanya mencapai 5.797.923 jiwa, atau berada di urutan keempat di antara provinsi-provinsi di Pulau Jawa (BPS, 2024). Kondisi ini menunjukkan adanya ketimpangan yang menarik, di mana besarnya konsentrasi industri di Banten belum sejalan dengan tingginya penyerapan tenaga kerja.

Secara konseptual, sejumlah faktor ekonomi, seperti investasi, pertumbuhan ekonomi, dan upah minimum, berdampak pada penyerapan tenaga kerja. Upah minimum dapat memengaruhi jumlah karyawan yang dipekerjakan oleh suatu bisnis. Selain itu, dengan meningkatkan pendapatan pekerja, kebijakan kenaikan upah

minimum dapat meningkatkan kesejahteraan pekerja. Namun di sisi lain, potensi dorongan bagi perusahaan untuk mengurangi jumlah tenaga kerja dapat pula ditimbulkan oleh kebijakan ini sebagai upaya menjaga efisiensi biaya produksi. (Sholihah & Arisetyawan, 2025). Sementara itu, pertumbuhan PDRB mencerminkan ekspansi kegiatan ekonomi yang secara teoritis mendorong peningkatan permintaan tenaga kerja (Tarman et al., 2022). Perluasan kapasitas produksi diperkirakan dapat dihasilkan dari investasi domestik, sehingga kebutuhan tenaga kerja pun pada akhirnya turut meningkat (Mankiw, 2016).

Namun pada kenyataannya, tidak selalu ada pola yang konsisten dalam hubungan antara ketiga faktor ini dan penyerapan tenaga kerja. Sejumlah studi menemukan hasil yang beragam tergantung pada karakteristik wilayah dan struktur industri masing-masing daerah. Hubungan positif dan signifikan ditunjukkan oleh upah minimum terhadap penyerapan tenaga kerja di Sumatera Barat ditemukan oleh Wafin Renaldi dan Nurfahmiyati (2022), sementara Lube et al. (2021) di Kota Bitung dan Putri et al. (2022) di Provinsi Jawa Tengah nyatanya bahwa upah minimum tidak memberikan pengaruh yang berarti.

Perbedaan arah temuan juga tampak pada variabel investasi domestik, di mana Hasmarini dan Budi (2025) melaporkan PMDN memiliki kontribusi terhadap penyerapan tenaga kerja secara nasional, sedangkan Putra et al. (2022) menemukan PMDN tidak berpengaruh signifikan dalam

jangka panjang karena karakteristiknya yang padat modal.

Sebaliknya, pengaruh PDRB relatif konsisten dilaporkan positif pada berbagai wilayah, seperti pada penelitian Tarman et al. (2022) dan Hafiz dan Haryatiningsih (2020), meskipun belum banyak dikaji secara khusus pada wilayah dengan struktur industri padat modal seperti Banten. Inkonsistensi temuan antar wilayah ini mengindikasikan bahwa karakteristik struktur industri dan kondisi ekonomi lokal turut menentukan arah dan kekuatan hubungan antar variabel, sehingga mendorong perlunya kajian empiris yang lebih spesifik di tingkat daerah, terutama di Banten yang memiliki karakteristik industri padat modal yang cukup dominan namun belum banyak menjadi fokus penelitian sejenis.

Meskipun berbagai penelitian telah mengkaji pengaruh UMK, PDRB, dan PMDN terhadap penyerapan tenaga kerja, sebagian besar dilakukan pada wilayah dengan karakteristik ekonomi yang beragam atau pada tingkat nasional (Astuti & Gunawan, 2023). Penelitian yang secara khusus menguji hubungan ketiga variabel tersebut pada daerah yang didominasi oleh industri padat modal, seperti Provinsi Banten, masih relatif terbatas dan cenderung berfokus pada sektor industri secara umum tanpa membandingkan pengaruh relatif antar variabel (Handoyo & Rudatin, 2023). Padahal, karakteristik struktur industri berpotensi memengaruhi efektivitas kebijakan upah maupun investasi dalam menciptakan kesempatan kerja. Oleh karena

itu, penelitian ini menawarkan perspektif yang lebih spesifik melalui analisis pada kabupaten/kota pusat industri di Provinsi Banten menggunakan pendekatan regresi data panel periode 2017–2024.

Pengkajian mengenai pengaruh Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK), Produk Domestik Bruto (PDRB), dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) terhadap penyerapan tenaga kerja di Provinsi Banten menjadi fokus utama penelitian ini. Identifikasi terhadap elemen-elemen yang merupakan determinan paling signifikan bagi peningkatan penyerapan tenaga kerja di daerah dengan dominasi sektor industri juga menjadi sasaran penting dari studi ini. Selain itu, penelitian ini dirancang untuk menghasilkan data empiris yang dapat digunakan sebagai landasan evaluasi terhadap efektivitas kebijakan upah minimum, pertumbuhan ekonomi regional, dan investasi domestik dalam penciptaan lapangan kerja, yang pada gilirannya diharapkan dapat mendukung pemerintah daerah dalam menyusun kebijakan.

METODE

Studi ini menggunakan metode kuantitatif berbasis data panel, yang terdiri atas data lintas sektoral dari empat kabupaten/kota dan data deret waktu 2017–2024. Seluruh data diperoleh dari publikasi resmi BPS Provinsi Banten. Gabungan kedua dimensi data tersebut menghasilkan total 32 unit observasi.

Penelitian ini menerapkan teknik purposive sampling, sehingga sampel diambil

secara selektif berdasarkan kriteria-kriteria tertentu yang telah disusun. Adapun kriteria yang ditetapkan meliputi kabupaten/kota dengan aktivitas ekonomi dan nilai investasi tertinggi, serta ketersediaan data yang lengkap selama seluruh periode penelitian. Berdasarkan kriteria tersebut, terpilih empat unit analisis, yaitu Kabupaten Tangerang, Kabupaten Serang, Kota Tangerang, dan Kota Cilegon.

Pemilihan keempat wilayah ini didasarkan pada pertimbangan bahwa kabupaten/kota tersebut merupakan pusat aktivitas industri dan investasi terbesar di Provinsi Banten, sehingga dinilai paling representatif untuk menggambarkan dinamika hubungan antara UMK, PDRB, PMDN, dan penyerapan tenaga kerja pada wilayah dengan struktur industri padat modal. Ketersediaan data yang lengkap dan konsisten selama periode 2017–2024 pada keempat wilayah ini turut menjadi pertimbangan utama, mengingat sejumlah kabupaten/kota lain di Provinsi Banten memiliki keterbatasan data pada beberapa tahun pengamatan.

Variabel dalam penelitian ini terdiri dari satu variabel dependen dan tiga variabel independen. Penyerapan tenaga kerja (Y) jumlah penduduk yang bekerja. Upah Minimum Kabupaten/Kota (X_1) merupakan standar upah minimum yang digunakan di masing-masing daerah. PDRB (X_2) mencerminkan kegiatan produksi yang mencakup barang dan jasa di suatu wilayah atas dasar harga konstan. Penanaman Modal Dalam Negeri atau PMDN (X_3) adalah total

nilai investasi domestik yang masuk ke masing-masing wilayah. Definisi operasional dijelaskan lebih lanjut pada Tabel 1.

Tabel 1. Definisi Operasional Variabel

Variabel	Definisi Operasional	Satuan
Penyerapan Tenaga Kerja (Y)	Jumlah penduduk yang bekerja pada suatu kabupaten/kota periode tertentu	Jiwa dalam
UMK (X1)	Upah minimum bulanan sebagai batas upah an terendah bagi tenaga kerja, ditentukan oleh pemerintah daerah melalui kebijakan.	Rp/bul
PDRB (X2)	Akumulasi nilai seluruh barang dan jasa yang dihasilkan oleh suatu wilayah, yang merepresentasikan tingkat aktivitas perekonomian di wilayah tersebut	Juta Rp
PMDN (X3)	Nilai realisasi investasi dari modal dalam negeri yang ditanamkan pada suatu wilayah.	Juta Rp

Penelitian ini menerapkan regresi data panel sebagai metode analisis. Guna menentukan model estimasi yang optimal, dilakukan dua pengujian berurutan, yaitu Uji Chow dan Uji Hausman. Uji Chow terlebih dahulu dilakukan untuk memilih CEM atau FEM. Bila hasil Uji Chow mendukung Fixed Effect Model, pengujian dilanjutkan dengan Uji Hausman untuk memutuskan antara FEM dan REM. Pemilihan didasarkan pada nilai probabilitas chi-square yang dibandingkan dengan taraf signifikansi 5%. Analisis uji F (simultan), uji t (parsial), dan koefisien determinasi kemudian digunakan dalam penelitian ini untuk mengevaluasi hipotesis menggunakan uji model yang terpilih.

Perangkat lunak EViews digunakan untuk semua pengolahan data dalam penelitian ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Karakteristik Wilayah Penelitian

Studi ini meliputi empat kabupaten/kota di Provinsi Banten yang dipilih berdasarkan tingkat aktivitas ekonomi dan investasi tertinggi. Keempat wilayah ini memiliki karakteristik struktur ekonomi yang berbeda. Kota Cilegon dikenal sebagai basis industri berat, logam, dan petrokimia dengan tingkat investasi padat modal yang tinggi. Kabupaten Serang memiliki karakteristik serupa dengan dominasi industri kimia dan manufaktur skala besar. Kabupaten Tangerang dan Kota Tangerang cenderung memiliki struktur ekonomi yang lebih beragam, dengan kontribusi industri manufaktur ringan, otomotif, makanan dan minuman, serta sektor jasa yang lebih signifikan dibandingkan dua wilayah lainnya. Perbedaan karakteristik struktural ini menjadi salah satu pertimbangan penting dalam menginterpretasikan hasil estimasi data panel pada penelitian.

Analisis Data Panel

Sebagai langkah awal, serangkaian pengujian dilakukan untuk menentukan model regresi data panel yang paling sesuai. Nilai probabilitas Uji Chow yang tercatat kurang dari 0,05 mengindikasikan bahwa FEM lebih unggul. Uji Hausman kemudian dilaksanakan sebagai tahap lanjutan, dan hasilnya didapatkan nilai probabilitas pula di bawah 0,05. Berdasarkan kedua temuan uji tersebut, *Fixed Effect*

Model dinyatakan sebagai pendekatan yang paling tepat untuk penelitian ini, melampaui *Random Effect Model*.

Pemilihan Fixed Effect Model ini dapat dipahami karena setiap kabupaten/kota karakteristik nya berbeda-beda, seperti komposisi industri, kebijakan ketenagakerjaan daerah, dan kondisi infrastruktur ekonomi, yang bersifat tetap namun berpengaruh terhadap penyerapan tenaga kerja. Model ini dapat mendeteksi antar wilayah tersebut secara lebih akurat. Hasil estimasi model terlihat dalam Tabel 2.

Tabel 2. Hasil Uji Analisis Eviews

Variabel	Coefficient	Std. err.	t-Statistic	Prob.
C	62,581,88	371.890,3	0,168280	0,8678
X1	-0,000574	0,108641	-0,005287	0,9958
X2	6,087778	1,530280	3,978211	0,0006
X3	-0,001390	0,014859	-0,093560	0,9262

Uji Hipotesis (Uji t)

Pengujian secara parsial mengungkapkan bahwa variabel PDRB (X2) memberikan kontribusi yang berarti terhadap penyerapan tenaga kerja ($p = 0,0006$). Akan tetapi, dua variabel lainnya, yaitu Upah Minimum Kabupaten/Kota (X1) dan Investasi Domestik (X3), tidak menunjukkan pengaruh yang memiliki tingkat signifikansi statistik, dengan masing-masing nilai p sebesar 0,9958 dan 0,9262. Dilihat dari besaran koefisiennya, variabel PDRB (X2) memiliki koefisien regresi sebesar 6,087778, yang berarti bahwa setiap kenaikan PDRB sebesar Rp1 juta pada harga konstan, secara rata-rata berasosiasi dengan penambahan penyerapan tenaga kerja sebanyak sekitar 6 orang, dengan asumsi variabel lain konstan.

Nilai koefisien ini mengindikasikan sensitivitas yang cukup besar antara

pertumbuhan ekonomi regional dan penciptaan lapangan kerja pada wilayah penelitian. Sementara itu, meskipun tidak signifikan secara statistik, koefisien UMK (X1) sebesar -0,000574 dan PMDN (X3) sebesar -0,001390 menunjukkan arah hubungan negatif dengan magnitudo yang sangat kecil, sehingga secara praktis pengaruh kedua variabel tersebut terhadap perubahan jumlah tenaga kerja yang terserap dapat dikatakan tidak berarti secara ekonomi.

Uji Koefisien Determinasi (Uji R²)

Kemampuan model dalam menjelaskan variasi penyerapan tenaga kerja tergolong tinggi, yang tercermin dari nilai Adjusted R-squared sebesar 0,897192. Sebesar 89,7192% variasi pada variabel dependen dapat dijelaskan oleh UMK, PDRB, dan PMDN, sementara 10,2808% dapat dijelaskan oleh variabel lain yang tidak diikutsertakan dalam model penelitian ini. Hasil uji kelayakan model memperlihatkan nilai probabilitas *F-statistic* sebesar 0,0000, yang lebih rendah dibandingkan tingkat signifikansi 5%. Kondisi ini menunjukkan bahwa kombinasi variabel UMK, PDRB, dan PMDN secara bersama-sama mampu menjelaskan perubahan penyerapan tenaga kerja secara signifikan. Tingginya nilai R-squared ini juga mengindikasikan bahwa efek individu (*fixed effect*) dari masing-masing kabupaten/kota turut berkontribusi besar dalam menjelaskan variasi penyerapan tenaga kerja, mengingat keempat wilayah penelitian memiliki karakteristik struktur ekonomi dan basis industri yang berbeda satu sama lain sebagaimana telah diuraikan pada bagian

karakteristik wilayah penelitian. Perbedaan karakteristik struktural inilah yang turut menjelaskan mengapa pengaruh UMK dan PMDN tidak konsisten secara statistik meskipun model secara keseluruhan tetap signifikan.

Pengaruh Upah Minimum terhadap Penyerapan Tenaga Kerja

Keberadaan variabel UMK belum memberikan kontribusi yang signifikan dalam menerangkan perubahan jumlah tenaga kerja yang terserap pada wilayah penelitian. Meskipun arah koefisiennya bersifat negatif, nilai probabilitasnya jauh melampaui taraf signifikansi yang ditetapkan, sehingga pengaruh tersebut tidak dapat dinyatakan bermakna secara statistik. Sejalan dengan hasil studi Lube et al. (2021) di Kota Bitung dan Putri et al. (2022) di Jawa Tengah, penelitian ini juga menemukan bahwa penyerapan tenaga kerja cenderung tidak sensitif terhadap perubahan tingkat upah minimum.

Kondisi ini erat kaitannya dengan karakteristik struktur industri di Provinsi Banten yang didominasi oleh sektor padat modal. Dalam industri semacam ini, perusahaan cenderung menentukan jumlah tenaga kerja berdasarkan kebutuhan kapasitas produksi jangka panjang, bukan berdasarkan fluktuasi upah minimum dari tahun ke tahun. Kenaikan UMK yang berlangsung setiap tahun selama periode penelitian dinilai tidak cukup besar untuk mendorong perusahaan melakukan penyesuaian signifikan dalam jumlah tenaganya. Di samping itu, semakin meluasnya penggunaan teknologi

otomasi di kawasan industri Banten turut memperkecil ketergantungan perusahaan terhadap tenaga kerja manusia, sehingga elastisitas permintaan tenaga kerja terhadap perubahan upah menjadi sangat rendah.

Dari perspektif teori upah efisiensi (*efficiency wage theory*) yang dikemukakan Katz (1986), rendahnya sensitivitas penyerapan tenaga kerja terhadap perubahan UMK pada penelitian ini juga dapat dijelaskan oleh perilaku perusahaan padat modal yang cenderung menetapkan upah aktual di atas UMK guna menjaga produktivitas dan mempertahankan tenaga kerja terampil. Dengan kondisi tersebut, perubahan UMK yang ditetapkan pemerintah daerah tidak banyak berpengaruh terhadap keputusan perusahaan dalam menentukan jumlah tenaga kerja, karena upah yang dibayarkan pada dasarnya sudah berada di atas batas minimum yang diwajibkan.

Temuan ini bertolak belakang dengan hasil penelitian Wafin Renaldi dan Nurfahmiyati (2022) yang menemukan UMK berpengaruh positif dan signifikan di Sumatera Barat. Perbedaan tersebut dapat dipahami dari sudut pandang perbedaan struktur industri antar daerah. Sumatera Barat dengan dominasi sektor perdagangan dan usaha kecil menengah yang bersifat padat karya cenderung lebih responsif terhadap perubahan upah dibandingkan Banten yang industrinya berskala besar dan lebih berorientasi pada efisiensi modal. Perbedaan ini juga dapat mengindikasikan adanya keterbatasan rentang variasi UMK pada data penelitian, sehingga uji statistik belum tentu

cukup kuat untuk mendeteksi pengaruh yang sesungguhnya; oleh karena itu diperlukan kehati-hatian dalam menafsirkan hasil non-signifikan ini sebagai bukti tidak adanya pengaruh UMK secara mutlak. Kesimpulannya, implikasi penyesuaian upah minimum terhadap jumlah tenaga kerja yang terserap tidak dapat digeneralisasi secara seragam, karena responsnya sangat ditentukan oleh kondisi ekonomi spesifik dan karakteristik pasar tenaga kerja di setiap daerah.

Pengaruh PDRB terhadap Penyerapan Tenaga Kerja

Dampak positif dan signifikan terhadap pergeseran tingkat penyerapan tenaga kerja hanya ditunjukkan oleh PDRB regional di antara variabel-variabel lainnya. Koefisien regresi yang positif dan nilai signifikansi di bawah 0,05 mengindikasikan bahwa kenaikan PDRB berkorelasi dengan peningkatan jumlah pekerja yang terserap. Hasil ini memperkuat temuan Warapsari dkk. (2023), Tarman dkk. (2022), Hafiz dan Haryatiningsih (2020), serta Anggrya dan Maimunah (2024), yang menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi daerah berperan dalam mendorong perluasan kesempatan kerja.

Selama periode 2017–2024, keempat wilayah yang menjadi objek penelitian menunjukkan tren pertumbuhan PDRB yang positif dan berkelanjutan, dengan pengecualian pada tahun 2020 yang mengalami guncangan ekonomi (kontraksi) disebabkan oleh merebaknya pandemi Covid-19. Pemulihan yang terjadi setelah periode tersebut bahkan menunjukkan akselerasi

pertumbuhan yang cukup signifikan, seiring dengan normalisasi aktivitas ekonomi dan industri di seluruh wilayah penelitian. Tren pertumbuhan ini mendorong ekspansi kapasitas produksi di berbagai sektor, yang pada gilirannya meningkatkan kebutuhan akan tenaga kerja tambahan secara organik.

Secara teoretis, temuan ini relevan dengan teori pertumbuhan regional dari Douglas C. North (1955), yang menekankan bahwa peningkatan output pada sektor-sektor basis ekonomi akan menciptakan efek pengganda terhadap penyerapan sumber daya manusia. Ketika sektor basis berkembang, permintaan terhadap barang dan jasa dari sektor pendukung juga ikut meningkat, sehingga menciptakan peluang kerja yang lebih luas secara tidak langsung. Selain itu, hasil ini juga sejalan dengan konsep derived demand dalam kerangka teori Marshall (1920), di mana volume output yang dihasilkan menjadi penentu utama kebutuhan perusahaan akan tenaga kerja. Kenaikan tingkat produksi menyebabkan dampak peningkatan langsung dalam permintaan tenaga kerja guna mendukung kelancaran proses manufaktur.

Pengaruh PMDN terhadap Penyerapan Tenaga Kerja

Secara teoretis, investasi dapat dijelaskan melalui teori investasi yang dikemukakan Mankiw (2016), yang mendefinisikan investasi sebagai pengeluaran untuk memperoleh barang modal (capital goods), seperti mesin, peralatan, dan gedung, yang digunakan dalam proses produksi. Penambahan barang modal tersebut

menambah stok modal dalam perekonomian, yang selanjutnya dimanfaatkan untuk memproduksi barang dan jasa. Dalam perspektif makroekonomi, investasi tidak hanya bertindak sebagai penambah modal, tetapi juga berkontribusi meningkatkan produktivitas produksi, karena peningkatan stok modal mendorong kenaikan produktivitas marjinal tenaga kerja (*marginal product of labor*). Kenaikan produktivitas marjinal tenaga kerja inilah yang secara teoretis mendorong timbulnya insentif bagi perusahaan untuk menambah kuantitas tenaga kerja yang dipekerjakan, sehingga investasi yang direalisasikan semestinya turut mendorong pertumbuhan aktivitas produksi sekaligus permintaan tenaga kerja. Dengan kata lain, penanaman modal secara konseptual merupakan faktor penentu kemajuan ekonomi sekaligus pembuka celah bagi terciptanya lapangan kerja baru, meskipun besar-kecilnya dampak tersebut sangat bergantung pada karakteristik investasi yang dilakukan, yaitu apakah investasi tersebut bersifat padat karya atau padat modal.

Namun demikian, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa PMDN tidak berpengaruh signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja di Provinsi Banten. Kondisi ini mengindikasikan peningkatan investasi domestik belum tentu diikuti oleh bertambahnya jumlah tenaga kerja yang dapat diserap oleh pasar kerja, sehingga relevansi teori investasi Mankiw (2016) di atas ternyata tidak sepenuhnya berlaku pada konteks wilayah penelitian, karena investasi

yang masuk didominasi oleh jenis investasi padat modal yang justru menggantikan kebutuhan tenaga kerja dengan mesin dan teknologi, bukan investasi padat karya yang secara langsung menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar. Meskipun koefisien regresinya memperlihatkan arah negatif, hubungan tersebut tidak signifikan secara statistik sehingga tidak dapat dijadikan dasar untuk menarik kesimpulan yang kuat. Selaras dengan laporan Putra dkk. (2022), penelitian ini mengonfirmasi bahwa PMDN tidak memiliki kontribusi yang dapat memengaruhi penyerapan tenaga kerja secara signifikan di Indonesia dalam jangka panjang. Kelemahan pengaruh PMDN tersebut diduga kuat disebabkan oleh pola investasi yang lebih mengutamakan intensitas modal dan teknologi daripada penyerapan tenaga kerja, sehingga hanya membutuhkan sedikit tenaga kerja untuk menghasilkan tingkat output yang sama. Efisiensi yang tinggi dalam investasi semacam ini justru membatasi penciptaan lapangan kerja secara langsung.

Pola serupa tampak jelas dalam konteks Banten, di mana investasi domestik terkonsentrasi pada sektor-sektor padat modal seperti industri logam dan petrokimia di Kota Cilegon, industri kimia di Kabupaten Serang, serta industri makanan-minuman dan otomotif di wilayah Tangerang yang semakin mengadopsi sistem otomasi (Handoyo & Rudatin, 2023). Data empiris menunjukkan bahwa meskipun nilai PMDN di salah satu kota penelitian mengalami lonjakan yang sangat besar dalam rentang waktu dua tahun, peningkatan penyerapan tenaga kerja yang

terjadi hanya bersifat marginal. Kondisi ini secara jelas mengindikasikan bahwa investasi yang masuk lebih banyak diarahkan pada pengadaan mesin canggih dan modernisasi proses produksi, bukan pada penambahan jumlah tenaga kerja secara langsung. Dengan demikian, dalam konteks ekonomi yang didominasi industri padat modal, arus investasi tidak secara otomatis diterjemahkan menjadi peningkatan penyerapan tenaga kerja yang berarti.

KESIMPULAN

Penelitian ini mengkaji keterkaitan antara UMK, PDRB, dan PMDN dengan penyerapan tenaga kerja di Provinsi Banten pada periode 2017–2024. Temuan empiris menunjukkan bahwa ketiga variabel independen berkontribusi signifikan secara simultan terhadap variasi penyerapan tenaga kerja. Akan tetapi, secara individual hanya PDRB yang terbukti memberikan pengaruh positif dan signifikan. Sebaliknya, UMK dan PMDN tidak memiliki hubungan yang signifikan dengan penyerapan tenaga kerja. Dengan demikian, pertumbuhan PDRB terbukti menjadi faktor yang lebih berpengaruh secara nyata dalam mendorong peningkatan penyerapan tenaga kerja di daerah penelitian, sedangkan kebijakan upah minimum dan investasi domestik belum cukup efektif dalam menciptakan kesempatan kerja di wilayah dengan karakteristik industri padat modal seperti Banten.

Implikasi penelitian menunjukkan bahwa peningkatan penyerapan tenaga kerja di Provinsi Banten lebih efektif melalui

pengembangan sektor padat karya, peningkatan kualitas SDM, dan investasi pada sektor berdaya serap tenaga kerja tinggi. Penelitian selanjutnya disarankan memperluas wilayah, menambah variabel seperti PMA, IPM, TPAK, atau inflasi, serta menggunakan periode pengamatan yang lebih panjang.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, masukan, dan kontribusi dalam penyusunan artikel ini. Semoga penelitian ini bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan menjadi referensi dalam perumusan kebijakan ketenagakerjaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggrya, Y., & Maimunah, E. (2024). Determinan penyerapan tenaga kerja di Pulau Jawa. *Journal on Education*, 6(4), 18544–18551. <https://eprints.ums.ac.id/id/eprint/106334>
- Astuti, R. D., & Gunawan, G. (2023). Penanaman Modal Asing dan Penyerapan Tenaga Kerja di Provinsi Jawa Barat. *Jurnal Kebijakan Ekonomi Dan Keuangan*, 2(2), 188–193. <https://doi.org/10.20885/jkek.vol2.iss2.art10>
- Gujarati, D. N. (2015). *Econometrics by example*. Palgrave Macmillan.
- Hafiz, E. A., & Haryatiningsih, R. (2020). Pengaruh PDRB, UMK, dan IPM terhadap penyerapan tenaga kerja kabupaten/kota di Jawa Barat tahun 2010–2020. *Journal Riset Ilmu Ekonomi*, 1, 55–65.
- Handoyo, F., & Rudatin, A. (2023). Analisis penyerapan tenaga kerja sektor industri di Provinsi Banten. *Jurnal Kebijakan*

- Ekonomi Dan Keuangan*, 2(1), 107–114.
<https://doi.org/10.20885/JKEK.vol2.iss1.art13>
- Hasmarini, I. M., & Budi, Y. H. S. (2025). Analisis pengaruh IPM, PDB, PMA, PMDN, dan TPAK terhadap penyerapan tenaga kerja di Indonesia 2004–2013. *Indonesian Journal of Digital Business*, 5(4), 2243–2254.
- Katz, L. F. (1986). Efficiency wage theories: A partial evaluation. In S. Fischer (Ed.), *NBER Macroeconomics Annual 1986* (Vol. 1, pp. 235-290). MIT Press.
- Lube, F., Kalangi, J. B., Tolosang, K. D., Pembangunan, J. E., Ekonomi, F., & Ratulangi, U. S. (2021). Analisis pengaruh upah minimum dan PDRB terhadap penyerapan tenaga kerja di Kota Bitung. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 21(03), 25–36.
- Mankiw, N. G. (2016). *Macroeconomics*. Worth Publishers.
- Marshall, A. (1920). *Principles of Economics*.
- North, D. C. (1955). Location theory and regional economic growth. *Journal of Political Economy*, 63(3), 243–258.
- Putra, F. W., Ariani, N., & Nofrian, F. (2022). Analisis Relevansi Penanaman Modal Asing, Modal dalam Negeri dan Upah Minimum terhadap Penyerapan Tenaga Kerja di Indonesia 1990 – 2019. *Jurnal Indonesia Sosial Sains*, 3(4), 708–719.
<https://doi.org/10.36418/jiss.v3i4.571>
- Priyatno, D. (2022). *Olah data sendiri: Analisis regresi linier dengan SPSS dan analisis regresi data panel dengan EViews*. ANDI.
- Putri, E., Setyowati, E., & Rosyadi, I. (2022). Pengaruh produk domestik regional bruto (PDRB), upah minimum kota/kabupaten (UMK), dan indeks pembangunan manusia (IPM) terhadap penyerapan tenaga kerja di Provinsi Jawa Tengah tahun 2016–2019.. *Ekonomis: Journal of Economics and Business*, 6(2), 651.
<https://doi.org/10.33087/ekonomis.v6i2.594>
- Sakti, M., Saleh, M., & Juliansyah, J. (2022). Pengaruh produk domestik regional bruto dan investasi swasta serta upah minimum terhadap penyerapan tenaga kerja. *Kinerja*, 18(4), 689–694.
<https://doi.org/10.30872/jkin.v18i4.10557>
- Sari, R. J., & Setyowati, E. (2022). Analisis pengaruh jumlah penduduk, upah, dan IPM terhadap tingkat pengangguran terbuka di Jawa Tengah tahun 2016–2020. *Procedia of Social Sciences and Humanities*, 3(c), 1–7.
<https://doi.org/10.21070/pssh.v3i.196>
- Sholihah, N., & Arisetyawan, K. (2025). Pengaruh Upah, Angkatan Kerja, Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Jawa Barat. *Independent: Journal Of Economics*, 5, 79–90.
- Simanjuntak, P. J. (2001). *Pengantar ekonomi sumber daya manusia*. Lembaga Penerbit FE UI.
- Sukirno, S. (2013). *Teori pengantar makroekonomi*. RajaGrafindo Persada
- Tarman, M., Ruski, Purnomo, I. A., Wahyuni, Zahroh, A., Besri, H., & Wafa, M. (2022). Pengaruh PDRB terhadap penyerapan tenaga kerja di Indonesia. *Equilibria Pendidilan*, 6(2), 57–64.
- Wafin Renaldi, & Nurfahmiyati. (2022). Pengaruh upah minimum, pertumbuhan ekonomi, dan investasi terhadap penyerapan tenaga kerja di Sumbar. *Jurnal Riset Ilmu Ekonomi Dan Bisnis*, 2(1), 23–30.
<https://doi.org/10.29313/jrieb.vi.647>
- Warapsari, E. B., Hidayat, W., & Boedirochminarni, A. (2023). Analisis pengaruh inflasi, PDRB, dan upah minimum terhadap penyerapan tenaga kerja di Jawa Timur. *Jurnal Ilmu Ekonomi (Jie)*, 5(2), 247–261.